

# Kecenderungan “Framing” Media Massa Indonesia dalam Meliput Bencana Sebagai *Media Event*

*Hermin Indah Wahyuni\**

## Abstract

*Mass media industries always frame their news based on their perspective and interest. This paper will examine the framing of disaster event and issues of contemporary Indonesia: the media framing on the natural disaster event (Yogyakarta’s earth quake, Mei 2006 and Padang’s earth quake, March 2007); the media framing on the disaster because of human factor (Senopati Tragedy, December 2006 and Adam Air Tragedy, January 2007); the media framing on the natural disaster because of natural and human factor (Lapindo Case, May 2006–March 2007). Based on framing analysis, this paper presents some interesting findings and discussion the different framing of each mass media as friends, foe, adversarial agent and empowerment agent.*

**Kata-kata kunci:** *framing media; bencana dan media event.*

## Pendahuluan

Dari aspek media, bencana yang tiada habisnya menimpa bumi Indonesia akhir-akhir ini memicu kajian kritis tentang apa dan bagaimana media memaknai keberadaan dirinya sebagai bagian dari institusi sosial. Keberadaan media dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi bagian penting yang tak bisa dipisahkan. Sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, media di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk dan wujudnya, baik yang masuk dalam kategori media tradisional, media massa (tradisional ataupun elektronik) dan juga beragam media baru yang konvergen satu dengan lainnya. Kehidupan masyarakat Indonesia sudah masuk dalam apa yang disebut sebagai “*mediated society*,” yang menempatkan media telah menjadi bagian penting dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tulisan ini merupakan kajian pada bagaimana media massa khususnya (baik cetak, elektronik, serta internet sebagai media baru) mengupas tema “bencana”. Bisa dilihat bagaimana optimalisasi jurnalistik media tentang

---

\* *Dr. phil. Hermin Indah Wahyuni* adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui email: [hermink12@yahoo.com](mailto:hermink12@yahoo.com).

bencana mengemas fenomena ini sehingga media muncul menjadi agen penting sebagai perantara antara masyarakat dan para pengambil kebijakan. Berita tentang bencana di surat kabar, televisi serta beberapa situs yang khusus memuat bencana akan dijadikan obyek penelitian, dan akan dianalisis dengan menggunakan metode "*framing*". Selanjutnya data yang ada akan diinterpretasi dengan menggunakan teori-teori media khususnya yang berkaitan dengan esensi politik keredaksian dan karakteristik dasar media massa. Metode *framing* yang digunakan disini tidak dimaksudkan untuk secara mendalam membedah ideologi sebuah media secara spesifik, namun akan lebih ditekankan pada bagaimana tema-tema tentang bencana diliput dalam media massa Indonesia secara umum.

## Metode Penelitian

*Framing* sebagai suatu metode penelitian telah dipahami secara luas dari berbagai sudut pandang. Namun setidaknya terdapat kesepakatan untuk memaknai apa yang disebut sebagai *framing*. Entman mendefinisikan *framing* sebagai: "*To frame is to select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a communication text, in such a way as to promote particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation.*" (Entman 1993:52)

Dalam sejarahnya konsep *framing* diinterpretasikan secara beragam. *Framing* dimaknai berbeda-beda dalam berbagai obyek kajian. Misalnya dalam psikologi, *framing* dimaknai sebagai skema, sedangkan dalam konteks ilmu informasi, skema merupakan instrumen representasi pengetahuan. Sosiolog Erving Goffman, yang lebih fokus pada obyek kajian komunikasi interpersonal dan komunikasi langsung memaknai *framing* sebagai pendefinisian tentang situasi yang sedang terjadi dan menjawab pertanyaan "*What is it that's going on here?*" Dalam konteks ilmu politik *frame* dimaknai sebagai bentuk dari sistem kepercayaan seperti diungkap oleh Gerhards/Rucht sebagai berikut: "*We define a belief system as a configuration of ideas and attitudes in which the elements are bound together by some form of constraint or functional interdependence*" (Urs, 2006: 52).

Dari rumusan ini dapat dikatakan bahwa pemaknaan *frame* dalam konteks politik ditempatkan dalam posisi meso konsep yang posisinya terdapat di antara level individual (mikro konsep) dan makro konsep (ideologi dan pandangan hidup). *Frame* berfungsi menghubungkan antara konsep abstrak berkaitan dengan ideologi dan level tingkal laku dalam kehidupan keseharian.

Dalam konteks studi media keberagaman perspektif coba diatasi oleh Dahinden dengan menawarkan serangkaian kategori *frame* yang menurutnya dapat dijadikan sebagai basis *frame* yang muncul dalam penelitian mengenai

sebuah tema (2006). Ia menamakannya sebagai *meta-analisis-proporsional* yang merupakan bangunan kategorisasi berdasarkan hasil dari serangkaian penelitian media. Basis *frame* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Basis Frame dari Urs Dahinden (2006:108)**

| <b>Basis Frame</b>  | <b>Definisi</b>                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konflik             | Tema yang dipilih berangkat dari konflik kepentingan antara kelompok sosial yang beragam |
| Ekonomi             | Tema diuraikan dari perspektif ekonomi                                                   |
| Kemajuan            | Tema dijelaskan dari konteks kemajuan dan perspektif ilmu pengetahuan                    |
| Moral, Etika, Hukum | Tema dibahas dan didiskusikan dari perspektif moral, etika dan hukum                     |
| Personalisasi       | Tema dijelaskan dari perspektif personal dari individu                                   |

Dengan alasan bahwa penelitian ini ingin menangkap kecenderungan umum ataupun fenomena makro media dan bencana, maka *metode Framing* yang diterapkan juga akan didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tersebut. Framing akan dilakukan secara umum melalui pengamatan pada obyek penelitian yaitu berita yang muncul di media cetak baik surat kabar nasional dan daerah, termasuk di dalamnya yang muncul di internet, serta pemberitaan mengenai bencana di media elektronik televisi. Periode penelitian sangat dipengaruhi oleh bencana alam gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 27 Mei 2006 lalu. Walaupun demikian fokus penelitian nantinya tidak sekedar peristiwa gempa bumi tersebut namun juga peristiwa bencana lainnya yang terjadi setelah bulan Mei tersebut hingga sekitar Maret 2007.

Walaupun banyak definisi tentang “bencana,” penelitian ini akan lebih berfokus pada peristiwa bencana baik yang berkait dengan fenomena alam maupun bencana yang diakibatkan oleh faktor kesalahan manusia dan memiliki aspek kepentingan publik yang sangat kuat dan menyedot perhatian banyak pihak khususnya media. Dengan studi ini diharapkan akan ditemukan pola umum framing media massa dalam melakukan liputan tentang bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Setidaknya terdapat beberapa tema berita berkait bencana yang banyak menyedot perhatian publik dan akan dijadikan obyek kajian. Khususnya masuk dalam 3 kategori bencana:

1. Bencana yang murni oleh alam:

- a. Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006
- b. Gempa bumi Padang Maret 2007
- 2. Bencana yang sedikit banyak mengandung campur tangan manusia
  - a. Tenggelamnya kapal Senopati (Desember 2006)
  - b. Hilangnya pesawat Adam Air (Januari 2007)
- 3. Bencana yang faktor penyebabnya melibatkan unsur alam dan kesalahan manusia.  
Luburnya lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur (Mei 2006–Maret 2007)

Pemilihan obyek kajian ini diharapkan mampu menggambarkan esensi pembedaan atau framing berita yang berbeda dalam meliput berita tentang bencana yang juga memiliki karakter yang spesifik dan tak bisa digeneralisasi satu dengan lainnya.

### **Harapan Masyarakat dan Keterbatasan Peran Media Massa**

Tingginya harapan masyarakat terhadap peran media sebagai sumber informasi yang handal tampak hampir dalam seluruh tahapan berkait dengan bencana. Mulai dari peringatan akan adanya bencana (jika jenis bencana bisa diprediksikan), memberikan informasi detail dan lengkap pasca bencana, hingga pemulihan pasca bencana. Namun demikian tentu saja berkait dengan kompleksitas problem di masyarakat seringkali berita-berita tentang bencana menjadi bukan lagi prioritas seiring dengan *magnitude* peristiwa itu sendiri.

Misalnya dalam kasus bencana gempa di Yogya bulan Mei 2006, banyak sekali opini masyarakat yang mengharapakan peran serta media yang lebih intens dalam percepatan pemulihan pasca gempa. Hal ini tampak seperti dalam ungkapan Achmad Djunaedi, kepala BID Yogyakarta yang menengarai beberapa potensi yang bisa dilakukan oleh media dalam proses ini:

“Pertama bahwa media seharusnya memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi....media bisa berperan penting dalam melakukan mediasi antara kepentingan masyarakat di satu sisi dengan implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan di sisi yang lain..... Diharapkan juga media berperan lebih aktif dalam masa recovery pasca bencana dengan menjadi mediasi informasi antara potensi-potensi ekonomi masyarakat” (Djunaedi, 2006: 14)

Pernyataan di atas memang masih sangat luas artinya. Pemaknaan media tidak saja sempit pada media massa cetak ataupun elektronik namun termasuk juga media tradisional, seperti halnya media komunikasi tatap muka (*face to face communication*), media luar ruang, media pameran, dan pertunjukan rakyat), mengingat masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal di pedesaan.

Jika dibawa dalam konteks media massa dan karakteristik pengelolaannya maka tingginya harapan masyarakat tampaknya harus berhadapan dengan fakta kinerja media yang khas. Proses *gatekeeping*, dan *agenda setting* dalam media menjadikannya harus melakukan seleksi dan memilih berita-berita yang akan dimunculkan dalam media mereka. *Concern* media akan terlihat dari ketekunan dan totalitas media melaporkan dan mengontrol proses yang berkait dengan bencana kepada masyarakat. Selanjutnya secara umum terdapat kecenderungan umum dalam liputan tentang bencana seperti diulas pada bagian di bawah ini.

### **Peran Media Massa dalam Meliput Bencana**

Media massa merupakan sumber utama informasi kejadian bencana, namun bukti empiris menunjukkan bahwa masyarakat akan mengkonfirmasi dengan sumber informasi lainnya seperti halnya *interpersonal communication*. Artinya *warning* yang disampaikan lewat media massa bisa jadi bukan merupakan acuan utama. Dalam hal ini akan dicari sinergi informasi dalam berbagai sumber. Jika sumber utama adalah dari rumor maka masyarakat akan mengkonfirmasi pada media massa untuk mengetahui kebenarannya. Hal ini seiring dengan pendapat Perry dan Lindell tentang keterpaduan saluran komunikasi, yang menyatakan, "*Technically any single communication channel can not meet the information demands...our data on citizen preference suggest two important conclusions. First, a mix of channels should be used to send messages. Second, the news media need to be systematically incorporated into this mix.*" (Perry dan Lindell, 1989, p.62).

Secara umum media massa memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam melakukan liputan pada bencana. Misalnya saja dalam melakukan liputan tentang bencana alam, media massa menggolongkan bencana sebagai "*perfect media event*" seperti dikemukakan oleh Bolduc, "*From the journalistic point of view, a natural disaster has all the ingredients for the perfect media event' (especially for the electronic media). It's brief, spectacular, often mysterious, action-oriented, and portrays human suffering and courage.*" (Bolduc, 1987: 12).

Sebagai sebuah *media event* maka setidaknya basis penilaian yang dilakukan adalah nilai berita yang dipilih. Beberapa nilai berita di antaranya *magnitude*, *personifikasi*, *proximity*, *kontroversi*, *magnitude*, *faktualitas*, *aktualitas*, dan *kemanfaatan* dari sebuah tema. Jika hal ini dikaitkan dengan genesis media yang beroperasi dengan prinsip bisnis maka pelaporan tentang bencana bisa jadi difokuskan pada aspek-aspek yang hanya terkait dengan fakta-fakta yang berpotensi untuk bisa dikomersialkan. Oleh karenanya tidak aneh bila liputan media tidak saja berdampak positif namun bisa juga berdampak negatif.

Setidaknya kecenderungan umum dalam liputan media massa adalah sebagai berikut:

*Pertama*, media massa mampu menghentikan sekaligus memicu rumor yang tak jelas. Di satu sisi media massa memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat sesaat setelah bencana melanda. Dalam konteks ini media massa sangat berperan untuk memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Berkait dengan bencana maka segala informasi yang terkait dengan bencana akan dikupas sedemikian rupa sehingga masyarakat mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga pada titik tertentu rumor yang tak jelas akan tertepis dengan pemberian informasi yang jelas. Pada sisi lain, sebaliknya media juga berpotensi untuk memicu timbulnya isu yang tak tentu kebenarannya. Dalam suasana panik akibat sebuah bencana maka media massa berlomba untuk mendapatkan pemberitaan yang paling eksklusif dan bernilai berita tinggi. Pada titik inilah kadang wartawan terpeleset dengan pemberitaan yang mentah dan belum dibuktikan kebenarannya. Tak ayal lagi pada posisi ini media massa justru menyebarkan isu. Lebih parah lagi jika isu yang diangkat malah memicu ketegangan dalam masyarakat.

*Kedua*, media menimbulkan efek kepanikan dan kengerian. Seringkali tak terhindarkan justru liputan media massa khususnya terhadap suatu ancaman bencana mengarah pada efek yang tak terhindarkan yaitu kepanikan. Efek ini semakin kuat dengan praktek *interconnection* media, yang selalu meneropong dan mengikuti apa yang diliput oleh media yang lain. Belum lagi jika dikaitkan dengan bias pemberitaan akibat bisnis media, maka laporan media akan selalu disetting sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual dalam liputannya. Media massa yang memiliki sifat *ubiquitous* (hadir di mana-mana), simultan (mengupas dari satu sudut pandang tertentu/*point of view*), dan kumulatif atau terus menerus (Griffin, 2006: 411) akan mempercepat efek kepanikan dan kengerian. Dalam liputannya tentang bencana, media cenderung melakukan liputannya dengan gaya pemberitaan yang dramatis. "*Dresden Syndrome*" sering digunakan untuk menggambarkan kecenderungan ini.<sup>1</sup> Pembaca ataupun *audience* seringkali mempercayai bahwa seluruh komunitas terkena dampak dari kehancuran tersebut, karena wilayah-wilayah yang tak terkena dampak bencana cenderung akan diabaikan. Selain itu pemberitaan yang intensif berkaitan dengan jumlah korban, penanggulangan korban serta bagaimana mereka terluka menimbulkan kengerian tersendiri ketika membaca liputan tentang bencana.

---

<sup>1</sup> Media melakukan liputan yang memberikan kesan besarnya efek kehancuran bencana yang diasosiasikan dengan gambaran kota Dresden di Jerman pasca pemboman PD II. Foto ataupun berita lebih terfokus pada *scenes* tentang kehancuran dan destruksi yang ditimbulkan sebagai efek bencana.

Menurut Larson (seperti dikutip Scanlon, 1980), faktor wartawan yang memiliki kecenderungan yang terlatih untuk melaporkan kejadian yang unik dan sensasional juga berkontribusi dalam hal ini. Dalam mendeterminasikan nilai-nilai berita berkait dengan bencana, dua kriteria seringkali muncul. *Pertama* adalah kematian dan luka-luka, *kedua* berkait dengan kerusakan infrastruktur. Dalam konteks inilah dapat dimengerti mengapa wartawan begitu memberikan perhatian dan melakukan wawancara dengan para korban, keluarganya dan para petugas penanggulangan bencana.

Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh mekanisme dan dinamika internal media yang nantinya bisa berkait dengan masalah bias pemberitaan dan pemilihan nilai berita. Dalam diskusi tentang *framing* juga sering dikupas masalah bias dalam pemberitaan dan pemilihan nilai berita karena kedua konsep ini memang saling berkait satu dengan lainnya.

Framing dan bias berita seringkali diperbandingkan. Bias berita merupakan liputan yang melanggar nilai obyektivitas dalam jurnalistik. Motif yang melatarbelakanginya juga beragam misalnya faktor individual dari jurnalis itu sendiri. Perbedaan antara kedua konsep terletak pada aspek bahwa framing meliputi lebih banyak dimensi dan gaya penggambaran yang berbasis data. Penulis dalam hal ini jurnalis bisa menempatkan posisinya secara negatif, netral, dan positif. Namun demikian kedua konsep memiliki kesamaan dalam arti keduanya berkait dengan proses konstruksi aktif yang berkait dengan masalah penilaian mendalam mengenai sebuah tema pemberitaan.

Framing dan nilai berita merupakan dua konsep yang memang saling berhubungan namun demikian perbedaannya adalah nilai berita merupakan konsep mikro, satu dimensi, bersifat deduktif, universal, fokus lebih khusus pada isi media. Sedangkan framing lebih bersifat meso konsep, deduktif-induktif, tak bersifat universal, dan berjangkauan lebih luas. Dalam praktek jurnalistik framing media akan bisa ditelusuri salah satunya melalui pemilihan nilai berita.

### ***Framing tentang Bencana yang Murni Peristiwa Alam***

#### **a. Gempa Bumi Yogyakarta, Mei 2006**

Gempa di Yogyakarta, Mei 2006 banyak disebut sebagai bencana alam terbesar kedua setelah tsunami Aceh tahun 2004. Gempa Yogya berkekuatan 5,9 skala richter, telah menelan korban sekitar 6.000 orang tewas. Gempa ini juga meluluhlantakkan sekitar 3.824 bangunan, infrastruktur dan memutuskan jaringan telekomunikasi di Yogyakarta dan Bantul (Purwo A, 2006). Beberapa tema seperti halnya pengelolaan bencana oleh pemerintah dibingkai dalam konteks konflik, pertumbuhan ekonomi serta dari aspek moral, etika, dan

hukum. Aspek framing lainnya yang mengemuka adalah masalah personalisasi. Tabel di bawah ini akan menggambarkan mengenai liputan media dan bencana gempa di Yogyakarta:

**Tabel 2. Framing Terhadap Liputan Bencana  
Gempa Bumi Yogyakarta (Mei, 2006)**

| <b>Tema</b>                                                                               | <b>Frame</b>                                             | <b>Teks Kunci</b>                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemerintah dan pengelolaan bencana                                                     | 1. Konflik<br>2. Ekonomi<br>3. Moral, Etika, Hukum       | - Keadilan dalam penyaluran bantuan ...<br><br>- Kepekaan terhadap krisis...<br><br>- Membangkitkan kondisi dunia usaha yang porak poranda akibat gempa |
| 2. Langkah untuk mengeliminir dampak gempa<br><br>3. Fenomena alam yang tak biasa terjadi | 1. Ilmu pengetahuan (Aspek teknologi)<br><br>2. Kemajuan | - irigasi yang rusak akibat gempa ...<br><br>- sumur meluap dan mengering di sebagian wilayah, dan munculnya sumber air baru di wilayah lain...         |
| 4. Duka korban bencana gempa<br><br>5. Fenomena gotong royong sebagai aksi cepat tanggap  | 1. Personalisasi<br>2. Moral, etika, hukum               | Perkembangan mental, psikologis...<br><br>Upaya bangkit dari keterpurukan daripada menunggu bantuan pemerintah yang tak pasti...                        |

#### **b. Liputan Gempa Padang 2007**

Gempa Padang 2007 tidak kalah besarnya dengan gempa di Yogyakarta, namun kurang mendapat liputan media secara luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh wilayah terjadinya gempa yang cukup jauh dari Jakarta, yaitu di wilayah Sumatera. Pembingkai media juga cukup berbeda dalam fokus dan tekanan liputannya, jika dibandingkan dengan liputan tentang gempa di Yogyakarta. Seperti tampak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Framing Terhadap Liputan Bencana  
Gempa Bumi Padang (Januari, 2007)**

| <b>Tema</b>                           | <b>Frame</b>                                                                                       | <b>Teks Kunci</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanganan bencana oleh pemerintah | 1.Konflik<br>2.Moral, Etika, Hukum                                                                 | Bantuan minim, Bantuan pusat vs daerah....                                                                                                                                                                                                 |
| 2.Dampak Bencana                      | 1.Personalisasi                                                                                    | Kerusakan akibat gempa...<br><br>Orientasi korban bencana....                                                                                                                                                                              |
| 3.Karakteristik gempa padang          | 1.Kemajuan (perspektif kelemahan/ kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi bencana) | Gempa Padang dipicu pelepasan energi yang terkumpul selama 60 tahunan di segmen Singkarak....<br><br>Gempa berpusat di patahan sesar semangko di darat dengan kedalaman episentrum 4 km...<br><br>Gempa di Sumatra Barat masih "pre shock" |

Akibat rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan bencana, maka liputan berita tentang gempa di Padang banyak difokuskan pada langkah aparat untuk mendistribusikan secara cepat bantuan-bantuan yang ada dan menumpuk. Hal ini rupanya merupakan problem tersendiri mengingat wilayah-wilayah yang letaknya sedemikian rupa sangat sulit dijangkau. Pembingkai tema berita berkaitan dengan gempa di Padang Sumatera Barat, juga banyak menyorot langkah pemberian bantuan dari pemerintah pusat.

Pernyataan wakil pemerintah pusat untuk membantu para korban bencana juga menjadi agenda penting, seperti kutipan kalimat yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi di bawah ini (Yurnaldi, 2007):

Saya segera akan mengekspose tentang bencana gempa di Sumbar kepada pemerintah pusat dan akan minta bantuan pusat segera dicairkan. Seperti dikatakan Menko Kesra Aburizal Bakrie, setiap rumah yang rusak berat dianggarkan bantuan Rp15 juta per unit dan Rp10 juta per unit untuk yang rusak ringan.

Tampaknya secara umum dapat dikatakan bahwa terjadinya bencana alam semacam ini otomatis menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang diharapkan optimal dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Jika dalam kasus Yogyakarta masalah ini yang kemudian banyak disorot sebagai masalah yang krusial, di Padang kasus serupa pun tampak muncul. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana menjadi topik yang cukup dominan.

### *Framing tentang kecelakaan Transportasi*

#### **a. Framing tentang berita tenggelamnya Kapal Senopati**

Kecelakaan tenggelamnya kapal Senopati merupakan peristiwa terburuk dan terfatal di penghujung tahun 2006. Kapal Motor Penyeberangan Senopati Nusantara yang membawa 628 penumpang tenggelam dan penumpang hilang diperkirakan hingga sekitar 400 orang (*Kompas online*, 26 Januari, 2007). Pembingkai media terhadap berita tenggelamnya kapal Senopati banyak didominasi oleh *framing* konflik, serta perdebatan antara moral, etika, dan personalisasi. Lebih detilnya bisa dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 4. Framing Terhadap Liputan  
Tenggelamnya Kapal Senopati (Januari, 2007)**

| <b>Tema</b>                                     | <b>Frame</b>                                             | <b>Teks Kunci</b>                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penyelamatan korban tenggelam kapal senopati | 1. Konflik<br>2. Moral, etika, hukum<br>3. Personalisasi | Keluarga korban KM Senopati Nusantara menuntut DPR membentuk tim investigasi khusus |

|                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                     | menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal tersebut...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Penyebab tenggelamnya kapal senopati                     | 1.Konflik<br>2.Kemajuan<br>(perspektif iptek dalam teknologi kapal) | <p>Cuaca buruk...</p> <p>adanya 12 kawasan perairan yang rawan badai dan ombak besar...</p> <p>gugatan ketidaksesuaian kapal <i>roll on roll off</i> yang secara teknis didesain untuk penyeberangan jarak pendek digunakan untuk pelayaran antarpulau dengan jarak tempuh lebih dari delapan jam...</p> <p>muatan bulldoser yang miring karena lepas ikatannya...</p> |
| 3. Kebijakan Pemerintah tentang keselamatan kapal penumpang | 1. Konflik<br>2. Moral, etika, hukum                                | <p>Pemerintah melakukan blunder yang fatal...</p> <p>Esensi pelayanan negara: layanan buruk, berarti buruk pulalah kualitas penyelenggara layanan tersebut...</p> <p>Perbaikan sarana dan prasarana transportasi serta regulasinya harus segera dilakukan...</p> <p>Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan lama bidang transportasi...</p> <p>Maklumat dikeluarkan</p>  |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  |  | pun pelanggaran masih terjadi.... |
|--|--|-----------------------------------|

Tampak pada tabel di atas ada tiga tema besar yang dominan yaitu penyelamatan korban tenggelam kapal senopati, penyebab tenggelamnya kapal, dan kebijakan pemerintah tentang keselamatan kapal. **Pada tema pertama** basis frame personalisasi khususnya digunakan saat menceritakan tentang upaya penyelamatan diri dari para korban tenggelamnya kapal senopati dan saat kejadian tenggelamnya kapal. Bingkai konflik tampak saat para korban menceritakan apa yang dilakukan oleh awak kapal dalam menyelamatkan para korban. Bingkai etika, moral, dan hukum juga digunakan dalam mendeskripsikan fenomena ini. Secara etika dan pertanggungjawaban moral para penumpang menganggap bahwa para awak kapal seharusnya mengutamakan keselamatan penumpang terlebih dahulu dan bukannya menyelamatkan diri masing-masing (Kompas online, 26 Januari, 2007). Dalam bingkai ini sempat muncul keinginan dari para korban untuk melakukan tuntutan terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas musibah ini. **Tema kedua**, media banyak mengangkat kemungkinan penyebab tenggelamnya kapal senopati. Beberapa penyebab seperti misalnya masalah cuaca, ketidaksesuaian design kapal dengan jarak tempuh, dan kelebihan muatan ataupun penumpang, serta terlambatnya maklumat Menteri Perhubungan untuk tidak memberangkatkan kapal jenis tertentu dalam kondisi cuaca buruk, serta penyebutan 12 kawasan yang rawan badai dan ombak besar banyak dibahas dan muncul dalam tema ini. Framing konflik akibat dilakukan pelanggaran aturan dan konteks kemajuan ataupun sekaligus kelemahan transportasi laut di Indonesia juga dibahas.

**Tema ketiga** yang muncul dalam framing tentang tenggelamnya kapal senopati adalah kebijakan pemerintah tentang keselamatan penumpang. Dalam konteks ini bingkai konflik, moral, etika, dan hukum sangat mengemuka. Dalam diskusi dan analisis media sangat jelas terlihat peristiwa kecelakaan ini sebagai cerminan buruknya manajemen transportasi negeri ini. Tiadanya kontrol yang ketat dan evaluasi kebijakan yang tidak standar dalam masalah keamanan transportasi menjadi sumber permasalahan yang banyak diangkat. Bingkai moral, etika dan hukum tampak dalam teks-teks kunci seperti halnya *pemerintah melakukan blunder yang fatal, pelayanan negara yang minim, perbaikan sarana dan prasarana transportasi serta regulasinya harus segera dilakukan, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan lama*. Semua teks dan *discourse* yang muncul dalam media menempatkan pihak pemerintah sebagai aktor penentu kebijakan yang tidak memiliki basis visi dan misi yang jelas dalam merumuskan kebijakan di bidang ini. Penempatan masyarakat sebagai korban dalam hal ini sungguh-sungguh

mencerminkan realitas sebuah relasi yang tidak setara antara pemerintah dan masyarakatnya. Beberapa demo dan kemarahan para anggota keluarga korban sungguh menciptakan sebuah relasi yang ironis. Fenomena ini juga dibingkai sedemikian rupa mengingatkan orang pada wacana perlawanan dari sebuah dongeng klasik “*David and Goliath*” yang sungguh tak imbang. David identik dengan para anggota keluarga korban yang mencari keadilan sedangkan sang raksasa Goliath tercerminkan melalui aktor-aktor seperti PT Prima Vista selaku penyelenggara operasional kapal senopati, dan pemerintah sendiri melalui departemen perhubungan.

#### **b. Framing tentang berita hilangnya Adam Air**

Belum tuntas kasus tenggelamnya kapal Senopati, pesawat Adam Air jurusan Surabaya – Manado yang mengangkut 96 penumpang, hilang pada 1 Januari 2007. Agenda media berubah dengan tekanan liputan pada hilangnya Adam Air dan mulai meninggalkan kasus tenggelamnya Senopati yang sebenarnya secara eskalasi dan besarnya korban sangat signifikan untuk dibicarakan. Pembingkaiian tema berita dalam framing media setidaknya dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 5. Framing Terhadap Liputan  
Hilangnya Pesawat Adam Air (Januari, 2007)**

| <b>Tema</b>                                     | <b>Frame</b>                                  | <b>Kata-Kata Kunci Dalam Teks Media</b>                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berbagai Asumsi<br>Tentang Hilangnya<br>Pesawat | 1. Konflik<br>2. Etika, Moral,<br>Hukum       | Kesalahan teknis,<br>sabotase,<br>gangguan cuaca,<br>kerusakan pesawat, jet<br>ekuator kemungkinan<br>penyebab hilangnya<br>AdamAir...<br><br>Buruknya pelayanan<br>negara...<br><br>Memblenya manajemen<br>negara Ini... |
| Pencarian Adam Air                              | 1. Kemajuan<br>2. Konflik<br>3. Personalisasi | Kapal AS Bantu<br>Pemetaan Laut...                                                                                                                                                                                        |

|                       |                  |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | <p>Fokker 50 dari Angkatan Udara Singapura yang memiliki teknologi melacak...</p> <p>Sulitnya medan pencarian...</p> <p>Tidak Kenal Lelah Mencari Adam Air...</p> |
| Kisah keluarga korban | 1. Personalisasi | Harapan agar pemerintah terus melakukan pencarian...                                                                                                              |

Framing berita utama tentang hilangnya pesawat adam air meliputi 3 tema utama: Berbagai asumsi tentang penyebab hilangnya pesawat, pencarian Adam Air, dan kisah keluarga korban yang ditinggalkan. **Pada tema pertama** yaitu berbagai asumsi tentang hilangnya pesawat, frame media mengarah pada basis frame seperti halnya konflik, terutama akibat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya, misalnya kesalahan teknis, serta gangguan yang tak mampu dihindarkan berkait dengan kesalahan teknis dan gangguan cuaca yang tak mampu dihindarkan. Semuanya bermuara pada isu buruknya pelayanan negara dan memblenya manajemen negara berkait dengan masalah transportasi yang sangat menonjol dibingkai dalam frame baik secara etika, moral, ataupun hukum. Frame semacam ini seharusnya dibaca oleh pemerintah sebagai peringatan untuk segera sadar bahwa perbaikan sarana dan prasarana transportasi serta regulasinya harus segera dilakukan. Pasalnya, banyak kebijakan lama bidang transportasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan armada dan penumpang. **Pada tema kedua** pencarian Adam Air berita-berita media banyak diwarnai oleh gambaran kualitas dan kecanggihan alat-alat untuk mencari Adam Air (penggunaan kapal AS untuk membantu pemetaan laut dan teknologi lacak yang dimiliki oleh Angkatan Udara Singapura)<sup>2</sup> framing kemajuan dalam konteks kemajuan (baca: teknologi) sangat

---

<sup>2</sup> Pencarian Adam Air selain melibatkan Armada kapal laut RI juga dilakukan oleh pihak-pihak asing seperti pihak AS yang membawa kapal US Naval Ship Mary Sears yang dilengkapi teknologi pemetaan bawah laut serta sonar untuk mendeteksi keberadaan logam di laut. Kapal tersebut merupakan salah satu dari tujuh kapal Oceanografic Survey milik Pemerintah AS. Panjang kapal 349 kaki (106,37 meter) dan

mewarnai upaya pencarian pesawat naas tersebut, walaupun akhirnya pesawat tak pernah ditemukan. Basis frame konflik dan sudut pandang personal pada tema kedua tampak dalam liputan tentang upaya yang tak kenal lelah dari berbagai kelompok pecinta alam, kelompok masyarakat, ataupun keluarga korban sendiri yang dengan alat seadanya mencari keberadaan pesawat. **Pada tema ketiga** kisah keluarga korban, banyak ditonjolkan aspek humanisme saat menceritakan kegetiran dalam menghadapi musibah. Dalam konteks ini berita juga diwarnai oleh wacana pemberian asuransi pada keluarga korban. Ironisnya, karena asuransi yang diberikan jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah asuransi yang diterimakan kepada korban kapal Senopati, maka publik pembaca seolah digiring untuk merenungkan rasa keadilan masyarakat dalam dua jenis kecelakaan yang membawa implikasi berbeda.

### *Framing tentang bencana Lumpur Lapindo: Faktor alam-manusia?*

Bencana lumpur Lapindo merupakan jenis bencana yang memakan waktu yang sangat panjang dan menguras tenaga dan pikiran banyak kalangan. Sejak melubernya lumpur dari perut bumi pada bulan Mei 2006 hingga pertengahan Maret 2007 dampak bencana sangat dirasakan begitu meluas dan belum jelas kepastian penyelesaiannya. Pemberitaan bencana lumpur Lapindo juga sempat timbul tenggelam dalam agenda setting media. Hal ini karena pemberitaan tentang Lapindo harus disela oleh pemberitaan-pemberitaan lainnya yang memiliki *magnitude* dan dampak yang tak kalah pentingnya di bidang ekonomi, politik, ataupun sosial budaya. Berita Lapindo muncul di halaman-halaman utama surat kabar dan mewarnai pemberitaan media jika terjadi suatu peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian. Misalnya, kasus meninggalnya beberapa petugas lapangan karena meledaknya pipa gas PERTAMINA, amblesnya wilayah di sekitar wilayah Porong, dan terganggunya transportasi Banyuwangi - Surabaya karena luberan lumpur panas. Secara umum media membingkai bencana lumpur Lapindo sebagai berikut:

---

kecepatan 16 knot (29,63 kilometer per jam). Selain tim dari Amerika Serikat, tim dari Singapore Air Force membantu pencarian dengan menggunakan pesawat Fokker 50 yang dilengkapi teknologi radar dan inframerah.

**Tabel 6. Framing Terhadap Liputan  
Semburan Lumpur Lapindo (Mei 2006-Maret 2007)<sup>3</sup>**

| <b>Tema</b>                                                                          | <b>Frame</b>                                                   | <b>Kata-Kata Kunci Dalam Teks Media</b>                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Penyebab melubernya lumpur Lapindo: bencana alam murni atautkah kesalahan manusia? | 1.Konflik<br>2.Moral, Etika, Hukum                             | Perusakan lingkungan hidup akibat praktek bisnis...<br><br>Kejahatan korporasi...           |
| 2.Skenario Penyelesaian: Tanggung jawab siapa?                                       | 1.Kemajuan<br>2.Konflik<br>3.Moral, Etika, Hukum<br>4. Ekonomi | Penyelesaian Kasus Lapindo: pemerintah Vs perusahaan...                                     |
| 3.Korban Lumpur Lapindo                                                              | 1.Personalisasi<br>2. Konflik<br>3. Ekonomi                    | Dana dan penyelesaian ganti rugi...<br><br>Unjuk rasa dan demonstrasi meminta ganti rugi... |

**Tema pertama** berkait dengan penyebab **melubernya lumpur Lapindo**, media membingkainya dalam framing apakah meluapnya lumpur Lapindo merupakan bencana alam murni atautkah kesalahan bahkan sebuah kejahatan korporasi yang disengaja. Mereka yang membingkainya sebagai kejahatan korporasi mengarahkan opini publik sedemikian rupa bahwa penyebab kejadian Lapindo ini merupakan kesalahan teknis saat menjalankan praktek eksplorasi di wilayah industri mereka yang menyebabkan luberan lumpur dari perut bumi. **Tema kedua Skenario Penyelesaian** Terdapat perbedaan mendasar berkait dengan ide penyelesaian Lumpur Lapindo. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan oleh berbagai pihak terkait penyelesaian kasus Lapindo. Seperti tampak dalam perdebatan di media berkait dengan konteks ini: *Pihak pemerintah pusat*, menganggap bahwa penyebab utama masalah ini adalah kelalaian pihak Lapindo, sehingga pihak pemerintah tampak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah yang tegas. Dalam hal ini ada konflik antara pemerintah daerah

<sup>3</sup> Hingga Maret 2007 semburan Lumpur panas masih belum terkendali seutuhnya bahkan semakin meluas. Periode yang dituliskan disesuaikan dengan periode penelitian sampai sekitar Maret 2007.

dan pemerintah pusat yang tertangkap melalui pernyataan mereka. *Pihak pemerintah daerah* cenderung mengambil posisi memberikan perlindungan pada warganya yaitu dengan berupaya menekan pemerintah pusat ataupun pihak Lapindo untuk melakukan ganti rugi pada para korban. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, Bupati Sidoarjo Win Hendarso mengungkapkan keresahan warga karena bantuan yang dijanjikan oleh Lapindo belum dikucurkan. Bupati Sidoarjo, kembali menegaskan kepada Lapindo Brantas Inc (LBI) agar mendahulukan pembayaran ganti rugi kepada warga korban luapan lumpur sebelum membangun jalan tol baru. Hal ini dikarenakan pemberian ganti rugi merupakan skala prioritas sosial utama yang harus dibayarkan daripada harus membayar ganti rugi ekonomi maupun infrastruktur yang rusak. Skenario penyelesaian yang berlarut-larut seperti ini menimbulkan kesan ketidakjelasan sehingga media banyak mendorong advokasi bahwa masalah ini harus dijembatani oleh DPR, karena DPR sebagai wakil rakyat dapat memanggil para pemimpin Lapindo, Medco dan Energi Mega Persada agar rakyat semakin tidak terkatung-katung. *Anggota Dewan Nasional WALHI*, Saifudin Ngulma menilai tak ada skenario yang jelas dari penanggulangan lumpur panas Sidoarjo sampai saat ini. *"Timnas yang bekerja saat ini, tak lebih hanya timnas perbaikan tanggul. Karenanya perlu segera penanggulangan yang efektif dari pada penaikan tanggul."* **Tema ketiga**, penderitaan korban lumpur Lapindo dibingkai melalui frame personalisasi, konflik, dan perspektif ekonomi. Personalisasi banyak digunakan untuk membingkai tema berita tentang penderitaan para korban. Biasanya berita berkaitan dengan kisah para korban lumpur Lapindo dan kemungkinan dana dan penyelesaian ganti rugi yang masih sulit mereka dapatkan. Aspek personalisasi dari konflik yang terjadi akibat pihak perusahaan yang tidak bertanggungjawab tampak dari gerakan unjuk rasa dan demonstrasi dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan. Keresahan memuncak kembali terutama saat perjanjian ganti rugi oleh pihak Lapindo yang tak kunjung ditepati dan pihak korban menuntut komitmen pemerintah. Menanggapi hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Rusia, menghimbau, *"Rakyat tidak boleh menjadi resah. Rakyat resah kalau bantuan finansial yang diterima tidak lancar. Saya lihat Wapres sudah menanganinya, jadi tolong Pak Gubernur menyampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Wagub Jatim, agar berkomunikasi dengan Wapres agar ada ketepatan dalam penyaluran bantuan,"* kata Presiden dalam percakapan dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Iman Utomo di pesawat yang terbang meninggalkan Tokyo menuju St. Petersburg, Rusia (Walhi, 20 Maret, 2007). Beberapa lembaga terkait di luar pemerintah juga ikut angkat bicara berkaitan dengan berlarut-larutnya kasus Lapindo.

Dari perspektif ekonomi, penanggulangan Lumpur Lapindo banyak dibingkai melalui perspektif dana. Seperti tampak dalam pernyataan direktur eksekutif JATAM, Siti Maemunah. Ia menggarisbawahi masalah dana juga mengemuka sebagai persoalan yang inti dalam kasus Lapindo: *“Dana penanggulangan bencana nasional 600 miliar, sementara untuk ganti rugi tanah rakyat dan lainnya diperlukan 1,2 triliun dan tak ada mekanisme dana talangan. Ini sangat menyengsarakan rakyat. Karena masyarakat di Porong, Sidoarjo sudah dijanjikan akan diberi ganti rugi yang akan diputuskan nilainya”* (Walhi, 20 Maret, 2007).

Seiring dengan lambatnya penyelesaian masalah ini citra negatif perusahaan semakin nyata. Banyak pihak menginginkan agar persoalan dana yang nyata-nyata mempengaruhi penyelesaian kasus Lapindo, dijembatani oleh DPR sebagai wakil rakyat. Penjualan Lapindo ke Freehold yang akhirnya batal menambah kecurigaan banyak pihak bahwa Bakrie group berupaya mempermainkan kasus ini. Masalah dana juga muncul dari Chalid Muhammad direktur eksekutif WALHI yang menambahkan bahwa sampai saat ini, walaupun jajaran direktur Bakrie Group, Nirwan Bakrie menyatakan akan tetap menanggung beban penanggulangan lumpur, namun Chalid menuduh ada politik uang yang dilakukan oleh Lapindo dalam hal pengucuran dana, karena sampai sekarang kinerja timnas penanggulangan lumpur tak efektif. *“Kalau Lapindo tak bertanggungjawab, sebaiknya di black list dari pasar modal dunia”* papar Chalid. Sementara itu, negara dianggap terlalu lemah menghadapi kasus Lapindo (Walhi, 20 Maret, 2007).

Demikianlah dari 3 tema besar frame media dalam membingkai kasus Lapindo ini, dapat dikatakan bahwa wacana yang ditampilkan media massa sangat bervariasi. Karena berlarut-larutnya bencana Lumpur Lapindo, berita yang muncul pun selain mampu menumbuhkan rasa iba dan empati juga mampu mendorong kekritisan masyarakat pembaca dalam ikut menilai penanganan bencana oleh pihak-pihak yang berwenang.

## **Penutup dan Kesimpulan**

Terdapat bingkai pemberitaan yang berbeda berkait dengan fokus liputan media dan jenis bencana. Pada bencana alam yang murni disebabkan oleh alam, dalam hal ini pada kasus gempa bumi Yogyakarta dan Padang, media membingkai liputannya dengan lebih terkait pada penanggulangan pasca bencana. Bahkan untuk kasus gempa Yogyakarta bingkai liputan lebih detil membahas mengenai peran pemerintah dalam pemulihan kembali infrastruktur yang rusak dan penanggulangan bencana. Untuk kasus gempa bumi Padang, liputan lebih terkait dengan masalah minimnya perhatian pusat pada wilayah

yang terkena gempa. Eskalasi kerusakan akibat gempa juga diliput sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa bencana ini juga tak bisa dibilang kecil dibandingkan dengan gempa Yogya. Wacana pengelolaan gempa oleh pemerintah pusat seperti juga muncul dalam gempa Yogyakarta sedemikian rupa muncul juga dalam kasus ini.

Framing tentang kecelakaan transportasi, yang mengambil studi kasus pada pemberitaan tenggelamnya kapal senopati dan hilangnya pesawat Adam Air banyak dibingkai dengan frame konflik, etika-moral-hukum, kemajuan, konflik, dan personalisasi.

Dalam kasus tenggelamnya kapal senopati dua tema besar yang paling dominan yaitu penyelamatan korban tenggelam kapal senopati, dan kebijakan pemerintah tentang keselamatan kapal penumpang dibingkai dalam basis frame personalisasi khususnya saat menceritakan tentang upaya penyelamatan diri dari para korban tenggelamnya kapal senopati dan saat kejadian tenggelamnya kapal. Wacana perlawanan seperti dalam sebuah dongeng klasik "*David and Goliath*" yang sungguh tak imbang bisa menjadi gambaran bagaimana kasus ini dibingkai.

Dalam kasus hilangnya pesawat Adam Air frame bingkai konflik berkait dengan masalah-masalah manajemen pemerintah dalam melakukan kontrol pada masalah keselamatan penumpang dan kualitas pesawat. Media massa membingkai masalah ini dengan menggambarkan sebuah kondisi ideal pengaturan transportasi dan memperbandingkannya dengan kondisi yang ada. Media juga menonjolkan frame personalisasi dalam proses pencarian Adam Air dengan menampilkan aspek humanis dari derita keluarga korban yang ditinggalkan.

Dalam kasus Lumpur Lapindo framing media berkait dengan analisis penyebab melubernya Lumpur Lapindo, skenario penyelesaian, dan penderitaan korban Lumpur Lapindo. Opini publik diarahkan sedemikian rupa pada analisis mengenai mengapa semburan lumpur bisa terjadi. Dalam konteks ini diajukan berbagai analisis mulai dari aspek yang kental dengan dimensi ilmu pengetahuan hingga kemungkinan terjadinya kejahatan korporasi. Pada tema skenario penyelesaian, bingkai konflik sangat menonjol muncul dalam pemberitaan mengenai pertikaian antar warga dan pihak perusahaan yang pada saat bersamaan menyerang pemerintah selaku penanggungjawab warga secara keseluruhan. Warna dimensi kemajuan ilmu pengetahuan walaupun cukup minim dapat ditemukan pula saat pembahasan mengenai kemungkinan teknologi yang bisa digunakan untuk menanggulangi semburan lumpur. Bingkai

frame etika, hukum, dan moralitas, tampak pada pemberitaan mengenai peran negara (pemerintah) dalam aspek perlindungan warganya di satu sisi dan prosedur yang seharusnya diterapkan karena kasus ini juga melibatkan sebuah perusahaan swasta. Lebih pelik lagi karena menteri Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dalam kabinet Yudhoyono diketahui publik sebagai konglomerat pemilik Perusahaan Lapindo Brantas Inc.

Secara umum dapat dikatakan bahwa framing media pada kasus bencana di tanah air masih sangat kental dengan wacana gugatan terhadap peran negara dalam penanggulangan bencana. Hal ini tampak dalam beberapa studi kasus yang dipilih sebagai topik utama penelitian ini. Tidak ada keterkaitan langsung antara jenis bencana alam dan frame berita, artinya baik pemberitaan mengenai bencana yang murni peristiwa alam, bencana yang lebih terkait dengan adanya campur tangan manusia hingga gabungan antara keduanya (murni peristiwa alam dan campur tangan manusia) frame berita menawarkan wacana yang senada yaitu menuntut, mempertanyakan, dan menggugat ketidakberdayaan pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Hasil yang ditonjolkan dalam point ke 4 di atas secara implisit menunjukkan bahwa, dalam konteks jurnalistik tentang bencana, media Indonesia secara umum masih menekankan aspek peran dan tanggungjawab pemerintah yang besar dalam penanggulangan korban. Padahal media sebenarnya juga memiliki potensi lain yang jauh lebih penting, yaitu untuk menghadirkan wacana lain seperti misalnya dorongan kemandirian untuk tetap *survive* pasca bencana. Hal ini memang sulit dipungkiri banyak dipengaruhi oleh dimensi lain yang memang berperan sangat menonjol, misalnya saja dalam kasus gempa padang, isu Jawa dan luar Jawa yang memang menonjol dalam diskusi yang sifatnya politis juga kembali mendapatkan pemaknaannya dalam kasus tersebut. Masyarakat diajak untuk membandingkan penanganan bencana gempa di Yogya dan Padang yang mau tak mau mengarah pada satu opini bahwa ada kelebihan-kelebihan yang menyolok dalam peran pemerintah di Yogya, yang tak bisa diketemukan dalam kasus yang sama di Padang. Kasus kecelakaan transportasi juga masih sarat dengan kekecewaan banyak orang terhadap kinerja pemerintah yang tak becus mengurus manajemen transportasi. Inilah yang dianggap sebagai biang keladi segala bencana transportasi di Indonesia. Dalam kasus luberan lumpur Lapindo, media kembali asyik dalam mewacanakan gagapnya pemerintah dan ketidakjelasan kebijakan dalam penanggulangan bencana.

Tidak ada yang bisa disalahkan dengan bingkai media yang seperti ini, walaupun bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh media masih bisa dan perlu untuk dioptimalkan lagi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengubah perspektif

dalam pemberitaan dengan tekanan pada pemberdayaan masyarakat dalam relasi dengan negara. Hal ini tampaknya penting melihat kondisi masyarakat yang memang masih belum menemukan format peran yang tepat dalam masa transisi dari masyarakat yang biasa tergantung pada pemerintah pada sebuah setting peran yang lebih mandiri dalam setting masyarakat demokratis. Kontribusi media untuk pemerintah juga bisa dilakukan melalui sumbangan pemikiran design kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana yang cocok untuk Indonesia. Selain tentu saja mengawal perbaikan kebijakan yang ada. Hal ini khususnya cocok untuk masalah transportasi. Jika media masih terjebak sekedar memotret bencana yang terjadi dalam masyarakat secara hitam putih, maka tak ada kontribusi optimal yang bisa diharapkan, bahkan salah-salah media massa bisa diposisikan sebagai provokator yang tak bertanggungjawab dan hanya memperkeruh suasana konflik yang memang biasanya mewarnai liputan tentang bencana.

Jika coba dikonfirmasi dengan konsep framing menurut Entman, media massa Indonesia sudah menjalankan fungsinya melalui proses framing dengan melakukan seleksi pada problem yang spesifik yang muncul secara variatif pada setiap bencana, interpretasi sebab akibat, dan evaluasi moral sudah coba dikemukakan. Namun khususnya untuk fungsi rekomendasi penanggulangan bencana demi tujuan kongkrit masih terasa kelemahannya sehingga ke depannya optimalisasi peran media massa masih bisa dilakukan melalui teknik jurnalistik, (pilihan nilai berita atau penghindaran bias berita) sehingga peran media massa bisa lebih positif dan optimal. Jika menggambarkan posisi media massa dalam sebuah kontinum, kualitas jurnalistik akan menjadi kunci yang menentukan posisi media massa apakah ia dikatakan sebagai *Friend* (teman), *Foe* (musuh), *Adversarial agent*, hingga *empowerment agent* dalam konteks pemberdayaan masyarakat. \*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Bolduc, J. P., (1987). 'Natural disasters in developing countries: myths and the role of the media.' *Emergency Preparedness Digest* 14. Hal: 12-14
- Dahinden, Urs, (2006). *Framing eine integrative Theorie der Massenkommunikation*, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft
- Entman, Robert M. (1993). 'Framing Toward Clarification of A Fractured Paradigm.' *Journal of Communication* 43, Hal 51-58
- Griffin EM (2006). *A First Look At Communication Theory*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- 'Musibah KM Senopati Nusantara,' *Kompas online*, up dated Jumat, 26 Januari 2007.

Moh. Ilyas Purwo A (2006). 'Bagai Duri dalam Daging.' *Kompas online*, Up dated 27 Mei 2006

Perry, Ronald W. and Michael Lindell (1989). 'Communicating Threat Information for Volcano Hazards. Dalam Lynne Masel Walters, Lee Wilkins and Tim Walters, (eds). *Bad Tidings Communications and Catastrophe*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum and Associates.

Scanlon, Joseph, (1980). *Research about the Mass Media and Disaster: Never (Well Hardly Ever) The Twain Shall Meet*, Ottawa: Emergency Communications Research Unit.

WALHI - Ada Politik Dana Di Balik Penyelesaian Kasus Lapindo, [www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/061130\\_poltk\\_dana\\_lapindo\\_cu](http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/061130_poltk_dana_lapindo_cu) - 40k

Yurnaldi (2007). 'Gubernur Sumbar Berharap Bantuan Pusat Segera Dicairkan,' *Kompas Online*, Up dated 14 Maret 2007

**Surat Kabar Cetak/Online**

*Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 16 Desember 2006